

*Standards for Providing Non-Permanent Employee Salaries (PTT) in Reaching Employee Welfare Levels at the Mataram City Environment Service*

Nisa Rauhul Fauziah<sup>1</sup>

Hailuddin<sup>2</sup>

Gusti Ayu Arini<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mataram

[anisarahulfauziah@gmail.com](mailto:anisarahulfauziah@gmail.com)<sup>1</sup>

[hailudin@gmail.com](mailto:hailudin@gmail.com)<sup>2</sup>

[gustiayu@gmail.com](mailto:gustiayu@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the welfare level of Non-Permanent Employees (PTT) of the Mataram City Environmental Service. The research method used is a quantitative descriptive research method, using a survey sample with data collection techniques using a questionnaire (questionnaire), documentation, and literature study. From a population of 729 people, researchers took 88 samples to be observed more deeply. Research shows that the welfare level of PTT at the Mataram City Environment Service for the salary received every month, the majority of PTT are included in the Prosperous Family Stage II because there are 58 people (66%). While the rest are included in the prosperous family stage III, and the prosperous family stage I / Poor. One of the factors that affect the level of welfare of PTT Mataram City Environmental Service is included in the category of prosperous family stage II, namely because the average PTT has a family (wife/husband) who also has income or works on the side.*

**Keywords:** *Non-Permanent Employees, Salary, Welfare, Welfare Family.*

**Standar Pemberian Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dalam Mencapai Tingkat Kesejahteraan Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan sampel survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner (angket), dokumentasi, dan studi pustaka. Dari populasi sejumlah 729 orang, peneliti mengambil 88 sampel untuk diamati lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram atas gaji yang diterima setiap bulannya, mayoritas PTT masuk dalam Tahapan Keluarga Sejahtera II karena terdapat 58 orang (66%). Sedangkan sisanya termasuk dalam tahapan keluarga sejahtera III, dan tahapan keluarga sejahtera I / Miskin. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram masuk dalam kategori tahapan keluarga sejahtera II yaitu karena PTT rata-rata memiliki keluarga (istri/suami) yang juga memiliki penghasilan atau bekerja sampingan.

**Kata Kunci:** Pegawai Tidak Tetap, Gaji, Kesejahteraan, Keluarga Sejahtera.

## A. Latar Belakang

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan tenaga kerja memiliki peranan penting dalam mempertahankan kelangsungan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Karena berkembang atau tidaknya sebuah instansi pemerintahan sangat tergantung pada kinerja atau produktivitas pegawainya. Hubungan antara pegawai dan instansi adalah hubungan yang saling bergantung dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Karena instansi pemerintah membutuhkan seorang pegawai sedangkan seorang pegawai membutuhkan instansi pemerintahan terkait untuk bekerja dan sekaligus untuk mengabdikan.

Didalam organisasi pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan satu satunya sumber daya manusia yang berperan didalam menjalankan strukturnya. Selain ASN juga terdapat pegawai lain yang non-ASN pegawai yang biasa disebut dengan tenaga 'honorier' atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). Keberadaannya kurang lebih ditujukan untuk membantu para ASN dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sehari-hari. Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di instansi pemerintah diakui cukup membantu dalam penyelesaian beban kerja sehingga pemberian layanan publik menjadi lebih efektif (dibandingkan jika tanpa pegawai PTT).

Beban kerja yang diberikan kepada tenaga PTT hampir setara dengan pegawai yang berstatus ASN, namun upah/gaji yang ditetapkan pemerintah untuk pegawai Tidak Tetap (PTT) masih jauh dari kata sejahtera, Gaji/upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas (Winda Asmara Putri 2018).

Jika para pegawai tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi sumber penghidupan para pegawai beserta keluarganya, melainkan akan langsung mempengaruhi pasar karena rendahnya tingkat permintaan atas penawaran, sehingga akan berdampak juga kepada ekonomi makro suatu negara. Perekonomian yang rendah pun menjadi salah satu dampak langsung dari rendahnya gaji pegawai. Bila seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tanah air mendapatkan gaji yang cukup rendah dan di bawah standar maka bukan tidak mungkin bahwa perekonomian rata-rata negara akan dinilai tergolong rendah.

Kesejahteraan atau sejahtera dalam arti umum merupakan kondisi seseorang dalam keadaan makmur, damai, sehat, dan semua kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. (Ruseffendi 2010).

## C. Analisis dan Pembahasan

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

Berdasarkan kuisisioner yang telah peneliti berikan kepada responden mengenai makan minimal dua kali atau lebih secara keseluruhan responden menjawab 100% atau 88 orang menyatakan mereka dan keluarga dalam sehari makan sebanyak minimal dua kali, artinya pada indikator kesejahteraan pegawai PTT yang paling mendasar ini sudah terpenuhi secara keseluruhan.

Table 4 1 Keluarga PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram makan dua kali atau lebih

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Terpenuhi	88	100
2.	Tidak terpenuhi	0	0
	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian

untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil kuisisioner yang dibagikan kepada responden, dari 88 responden yang mengisi kuisisioner tentang kepemilikan [pakaian yang berbeda untuk melakukan setiap aktivitas yang berbeda terdapat 85 orang (96,6%) menyatakan memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas atau kegiatan yang berbeda bedan dan terdapat 3 orang (3,4%) yang menyatakan tidak memiliki pakaian yang berbeda dalam setiap acara atau aktivitas yang berbeda. Artinya untuk indikator kesejahteraan ini pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram sudah memenuhi kriteria KS 1.

Table Pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram memiliki baju yang berbeda untuk setiap acara atau kegiatan

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Memiliki pakaian yang berbeda	86	96,6
2.	Tidak memiliki pakaian yang berbeda	3	3,4
	<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

Kualitas kondisi tempat tinggal sangat berpengaruh dalam kesejahteraan PTT. Keadaan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dapat dijadikan salah satu indikator untuk menunjukkan keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat. Semakin baik kondisi dan fasilitas rumah, maka akan semakin baik pula keadaan sosial orang tersebut. Keadaan tempat tinggal menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dengan melihat kondisi atap rumah, dinding, dan lantai rumah yang baik. Keadaan tempat tinggal PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram sebanyak 82 orang (93,2%) yang mempunyai kondisi atap rumah, dinding rumah, dan lantai rumah yang

baik sedangkan sebanyak 6 orang (6,8%) yang mempunyai kondisi atap, dinding, dan lantai yang tidak baik.

Table Keadaan Tempat Tinggal pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Kondisi rumah baik	82	93,2
2.	Kondisi rumah tidak baik	6	6,8
	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

Berdasarkan hasil jawaban dari kusioner yang telah disebarkan kepada responden peneliti mendapatkan hasil mengenai keluarga yang sakit dibawa kepada sarana kesehatan modern seperti puskesmas dan rumah sakit terdapat 81 orang (92%) yang menyatakan pergi ke sarana kesehatan modern jika dalam kondisi sakit sedangkan 7 orang (8%) yang menyatakan tidak pergi ke sarana kesehatan jika sakit melainkan masih berobat dengan cara tradisional.

Table Anggota keluarga pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dibawa ke sarana kesehatan

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Pergi ke sarana kesehatan	81	92
2.	Tidak pergi ke sarana kesehatan	7	8
	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB

dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. Alat KB sudah dapat diperoleh masyarakat di tempat pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas sehingga tidak perlu ke rumah sakit. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

Program Keluarga Berencana (KB) PTT yang berusia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi ditujukan kepada responden dengan status perkawinan yaitu menikah 88 responden sudah berstatus menikah. Dari 88 responden pegawai PTT yang ingin ber KB dan pergi ke pelayanan kontrasepsi terdapat 71 orang (80,7%) yang pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi dan terdapat 17 orang (19,3%) yang menyatakan tidak ber KB dan tidak pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Table Pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Pergi ber KB	71	80,7
2.	Tidak pergi ber KB	17	19,3
	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

Tingkat kesejahteraan PTT salah satunya dapat dilihat dari indikator anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

Dari 88 pegawai PTT yang berstatus menikah terdapat 6 (6,8%) diantaranya tidak memberikan jawaban. Sedangkan sisanya 82 orang (93,2%) memiliki anak yang sedang bersekolah.

Table Pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi pegawai PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

No	Kriteria	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Anak umur 7-15 tahun bersekolah	82	93,2
2.	Tidak menjawab	6	6,8

	<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
--	--------------	-----------	------------

*Sumber: Data Diolah*

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dengan kriteria tingkat kesejahteraan BKKBN, maka dapat disimpulkan tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram atas gaji yang diterima setiap bulannya yaitu terdapat 58 orang (66%) yang termasuk dalam Tahapan Keluarga Sejahtera II. Sedangkan sebanyak 17 orang (19%) termasuk dalam tahapan keluarga sejahtera III, dan sisanya sebanyak 13 orang (15%) termasuk dalam tahapan keluarga sejahtera I / Miskin. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan PTT Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram masuk dalam kategori tahapan keluarga sejahtera II yaitu karena sebanyak 58 orang (65,9%) PTT memiliki keluarga istri/suami yang juga memiliki penghasilan atau bekerja, dengan rata-rata berpenghasilan Rp. 600.000 - Rp. 1.000.000. Sehingga dari faktor tersebut dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan pegawai menjadi setingkat lebih baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 2014. Analisis data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press
- Arikunto, S. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Akhiriyah, Dewi Yuni. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V SD N Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. Jurnal Kependidikan Dasar. Vol: 1, No: 3.
- Anang Pikukuh Purwoko, 2013. Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur Sebagai Perbandingan Dengan Praktek Pada Organisasi Publik Di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- Drs. Moekijat, 1992, Administrasi Gaji dan Upah Bandung: Mandar Maju
- Dessler, G. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Garry Dessler, 1998, Manajemen Sumber Daya Manuia, terj. Benyamin molan Jakarta: PT. Prenhalindo
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Grasindo.
- Melayu S. Hasibuan, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara
- Melayu S. Hasibuan. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

- Michael Amstrong dan Helen Murlis, 1998, Sistem Penggajian, terj. Rochmulyati Hamzah Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- F. Winarni, G. Sugiyarso, 2006, Administrasi Gaji dan Upah, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
- Sadili Samsudin, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: CV Pustaka Setia
- Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ruseffendi, E.T. 2010. Dasar-Dasar Penelitian dan Bidang Non-Eksakta Lainnya. Bandung: PT. Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. AlfaBeta : Bandung.
- Winda Asmara Putri, 2018. Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro
- Mondy, R. Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 10 jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Sadili Samsudin, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pustaka Setia
- Tjutju Yuniarsih dan Suwatno. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta
- Handoko. T. Tani. 2012. Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta
- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta
- Ishak, dkk. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta : Universitas Tri Sakti
- Nawawi Hadari. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handoko, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi ke- 2. Yogyakarta. BPFE
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sarwoto, 1991. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purwono. H., 2003, Sistem Personalialia, Edisi Ke-3, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Tisna Sukmana, 2017. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya, Pascasarjana Universitas Galuh.
- Meirisa Ekawati, 2018. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Guru Honorer Di Smp Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Maya Risanti, 2012. Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah, Universitas Islamnegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Wandi Arifin, 2019. Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Hanifa, dkk, 2016. Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Besar Gaji Untuk Guru Honorer Di Kabupaten Pesawaran Menggunakan Metode Fuzzy Saw, STMIK Pringsewu Lampung
- Randy Ramadhoni, 2019. Implementasi Penggajian Guru Honorer Di Sekolah Dasar, RSU YK Madira Palembang
- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Moh. Solehuddin, 2020. Kerjasama Antara Kemenag Dengan Pemdadalam Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah, STSI BCU Cirebon.
- [BPS: Oktober 2021 Inflasi Sebesar 0,12 Persen \(kompas.com\)](https://money.kompas.com/read/2021/11/01/115849226/bps-oktober-2021-inflasi-sebesar-012-persen) diakses 1 Desember 2021 <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/115849226/bps-oktober-2021-inflasi-sebesar-012-persen>
- [Upah Minimum : UMP dan UMK Nusa Tenggara Barat 2020 - Gajimu.com/Garmen](https://gajimu.com/garmen) Diakses 3 Desember 2021 <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-ntb>
- Veithzal Rivai, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan cetakan pertama, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Veithzal Rivai. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.